



Pengaruh Ideologi Hindutva Terhadap Isu Islamofobia Di India Pada Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2019 (Periode Tahun 2020-2024)

Nadia Nur Aulia Firdhausya¹
Rafika Arsyad²

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Ideologi Hindutva terhadap isu islamofobia di India pada implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 yang diterapkan oleh pemerintah India pada era kepemimpinan Narendra Modi. Tujuan penelitian yakni mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap tingkat islamofobia di India dan diskriminasi terhadap imigran Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis SWOT. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, termasuk buku, artikel, jurnal, berita daring, dan situs web resmi, serta sumber data lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan Teori *Decision Making by Snyder* dan konsep politik identitas untuk membedah lebih dalam mengenai pengaruh Ideologi Hindutva yang dianut oleh pemerintah India dalam kasus tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Ideologi Hindutva yang diterapkan dalam pemerintahan India yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi beserta partai *Bharatiya Janata Party (BJP)* berpengaruh pada disahkannya kebijakan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019. Undang-undang tersebut menetapkan hanya memberikan kewarganegaraan pada imigran dari Afghanistan, Bangladesh, Dan Pakistan dari segi agama tertentu yakni Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Kristen dan mengecualikan Islam sehingga menimbulkan kontroversi dan berdampak pada meningkatnya diskriminasi pada kaum Muslim.

Kata Kunci: *Ideologi Hindutva, Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019, Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), Islamofobia*

¹ ¹Prodi Hubungan Internasional
Universitas Peradaban
e-mail : nadianuraulia08@gmail.com

² ²Prodi Hubungan Internasional
Universitas Peradaban
e-mail : rafika.arsyad@gmail.com

Abstract:

his research examines how Hindutva ideology affects the rise of Islamophobia in India, particularly regarding the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019 by the Indian government under Narendra Modi's leadership. The study aims to assess the law's impact on Islamophobia levels and the discrimination experienced by Muslim immigrants from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Utilizing a qualitative methodology with a SWOT analysis framework, the research gathers secondary data from literature reviews, including books, articles, journals, online news, official websites, and other relevant sources. The study incorporates Snyder's Decision Making Theory and the concept of identity politics to explore the influence of Hindutva ideology promoted by the Indian government. Findings suggest that Hindutva ideology, as implemented by Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party (BJP), played a significant role in the enactment of the CAA, which grants citizenship only to immigrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan belonging to specific religions Hinduism, Sikhism, Jainism, Parsi, and Christianity while excluding Muslims. This exclusion has sparked controversy and heightened discrimination against the Muslim community.

Keywords: *Hindutva ideology, Citizenship Amendment Act of 2019, Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), Islamophobia*

Pendahuluan

Sebagai negara yang mengklaim sebagai negara sekuler dalam konstitusinya, India memiliki pendekatan proteksionis dalam mengelola keberagaman agama dan masyarakat termasuk Islam yang menjadi agama kedua terbesar di negara tersebut. Meskipun India mempromosikan sekularisme, kekuatan peradaban lokal sering kali tidak sepenuhnya mengakui Islam. Kekuatan ini tidak hanya berakar pada praktik ilmiah atau adat istiadat, tetapi juga pada pengaruh mendalam dari spiritualisme Hindu yang meresap dalam berbagai tradisi dan aktivitas negara. Pengaruh ini membentuk pola pikir, perilaku, dan kegiatan individu dalam kerangka yang ketat termasuk dalam pemerintahan (Thohir, 2006).

Selama masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, ketegangan antara Hindu dan Muslim meningkat akibat penyebaran komunalisme atau nasionalisme agama. Partai-partai politik dan kelompok ideologis memanfaatkan sentimen Hindu untuk mendapatkan dukungan, dengan kelompok nasionalis Hindu seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)* dan *Bharatiya Janata Party (BJP)* berupaya menjadikan India sebagai negara yang didasarkan pada nilai-nilai Hinduisme. Meskipun RSS dan BJP berusaha memperjuangkan identitas Hindu, mereka lebih merupakan gerakan politik daripada kelompok keagamaan murni. Perkembangan India sebagai negara Hindu mencerminkan pelaksanaan Ideologi Hindutva yang diterapkan pada pemerintahan India. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi dan partai BJP, ideologi ini semakin mendapatkan tempat, terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk memperkuat posisi komunitas Hindu dalam struktur sosial dan politik India (Arvind Sharma, 2020).

Keterkaitan kuat antara partai BJP dan Ideologi Hindutva berkontribusi pada kesuksesan partai ini dalam pemilu. Partai BJP berhasil menarik suara dari kaum mayoritas Hindu dan unggul dalam 2 kali pemilu yakni tahun 2014

dan 2019. Namun, politisasi agama Hindu oleh BJP semakin menguat sehingga menyebabkan masyarakat Muslim merasa terpinggirkan akibat kebijakan yang dianggap agresif dan diskriminatif (Krishnan, 2022).

Isu kewarganegaraan telah lama diatur oleh pemerintah India khususnya bagi imigran dari negara-negara di bagian Asia Selatan seperti Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh yang bermigrasi dengan bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang dianggap lebih layak dari negara tersebut. Alasan para imigran sebagian besar karena mencari perlindungan dari konflik yang terjadi di negaranya dan mencari suaka. Pengungsi dari tiga negara dari Asia Selatan ini sebagian besar merupakan umat Muslim tetapi di antara mereka terdapat juga banyak umat Hindu dan Sikh yang beranggapan bahwa India adalah tanah leluhur mereka. Untuk mendapatkan perlindungan penuh di India, kewarganegaraan menjadi syarat utama karena tanpa status tersebut mereka tidak memiliki akses ke hak-hak dasar yang diatur dalam Konstitusi India.

Pada tahun 1955, pemerintah India menetapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai akuisisi dan penentuan perolehan kewarganegaraan di India. Peraturan ini menetapkan kriteria bagi individu yang dapat menjadi warga negara India mencakup warga negara asli maupun imigran ilegal dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut meliputi kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir, melalui keturunan, pendaftaran dalam *National Register of Citizenship (NRC)*, proses naturalisasi, serta kewarganegaraan yang diberikan akibat penggabungan wilayah.

Selama lebih dari 64 tahun, India mengandalkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 yang mengatur mengenai isu kewarganegaraan. Masyarakat India yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, hidup berdampingan tanpa terjadi konflik besar. Namun pada tahun 2019 Dewan Negara (*Rajya Sabha*) melakukan amandemen terhadap

Undang-Undang tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari partai BJP mengusulkan perubahan terkait pengaturan imigran. Amandemen ini menambahkan sejumlah persyaratan baru yang perlu dipenuhi oleh imigran untuk memperoleh status kewarganegaraan India. Berikut adalah penjelasan mengenai kebijakan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 yang telah diperbarui pada tahun 2019.

Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 (*The Citizenship Act*) berbunyi:

“Migran ilegal” berarti orang asing yang telah masuk ke India-(i) tanpa paspor yang sah atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau di bawah hukum apa pun atas nama itu; atau (ii) dengan paspor yang masih berlaku atau dokumen perjalanan lainnya yang sah dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan hukum apa pun atas nama tersebut tetapi tetap berada di sana melebihi jangka waktu yang diizinkan.

Ketentuan untuk mendapatkan status Kewarganegaraan di India:

1) Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Setiap orang yang lahir di India, salah satu orang tuanya adalah warga negara India dan yang lainnya bukan migran ilegal pada saat kelahirannya, akan menjadi warga negara India sejak lahir.

2) Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan

Seseorang yang lahir di luar India akan menjadi warga negara India berdasarkan keturunan jika ayahnya adalah warga negara India pada saat kelahirannya; atau jika salah satu orang tuanya adalah warga negara India pada saat lahir.

3) Kewarganegaraan Berdasarkan Pendaftaran

Seseorang yang menikah dengan warga negara India dan biasanya bertempat tinggal di India selama tujuh tahun sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

4) Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

Jika seseorang yang sudah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas hukum, serta bukan merupakan migran ilegal, mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat naturalisasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, Pemerintah Pusat dapat menyetujuinya jika yakin bahwa pemohon memenuhi syarat naturalisasi sesuai dengan ketentuan dalam Jadwal Ketiga. Sertifikat naturalisasi akan diberikan kepada pemohon, dengan catatan bahwa jika Pemerintah Pusat menilai pemohon telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, sastra, perdamaian dunia, atau kemajuan umat manusia, maka mereka dapat mengabaikan sebagian atau seluruh syarat yang tercantum dalam Jadwal Ketiga.

5) Kewarganegaraan Berdasarkan Penggabungan Wilayah Asing Ke India

Prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan ini dapat dilakukan ketika suatu wilayah resmi menjadi bagian dari India. Pemerintah Pusat, melalui perintah yang diumumkan dalam Lembaran Negara Resmi, dapat menetapkan individu-individu yang akan menjadi warga negara India berdasarkan hubungan mereka dengan wilayah tersebut. Orang-orang ini akan diakui sebagai warga negara India mulai dari tanggal yang akan ditentukan (THE CITIZENSHIP ACT, 1955, n.d.)

Kemudian di amandemen pada tahun 2019 bagian 2 ayat 1 (b) yang berbunyi:

“Dalam undang-undang kewarganegaraan 1955 (selanjutnya disebut sebagai undang-undang utama), di bagian 2, di sub bagian (1) dalam klausula (b), ketentuan berikut harus disisipkan, yaitu:

“Asalkan setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat oleh atau dibawah klausul (c) dari sub-bagian (2) dari bagian 3 Undang-Undang paspor (Masuk ke India), 1920 dari penerapan ketentuan undang-undang orang asing, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di dalamnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran illegal untuk tujuan undang-undang ini” (MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, n.d.).

Sebelumnya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 tidak mengakui pengungsi tanpa dokumen yang sah dan tidak mempertimbangkan perbedaan agama. Namun pada Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 ini pemerintah India menerima pengungsi dari tiga negara dari Asia Selatan berdasarkan agama minoritas. Dengan demikian, berdasarkan kebijakan ini pula Imigran yang sebelumnya merupakan warga negara India akan kehilangan status tersebut secara otomatis jika mereka tidak berasal dari kelompok agama minoritas. Fenomena ini dianggap sebagai diskriminasi yang seharusnya tidak diterima, mengingat prinsip sekulerisme yang menjadi dasar negara India dan telah diatur dalam konstitusi sejak kemerdekaan.

Perdana Menteri Narendra Modi bertujuan untuk memulai agenda "Hinduisasi" di India ketika Undang-Undang Kewarganegaraan India dibuat pada tahun 2019 sehubungan dengan kemenangan Partai BJP. Kelompok Nasionalis Hindu mendukung kebijakan ini karena mereka percaya jika negara harus melindungi identitas Hindu di India yang dianggap terancam oleh kedatangan imigran, terutama Muslim. Tanpa UU ini, populasi Hindu

yang asli bisa menjadi minoritas. Meskipun muslim India adalah minoritas, mereka sebenarnya sangat banyak ada sekitar 200 juta individu (Lavinia, 2020).

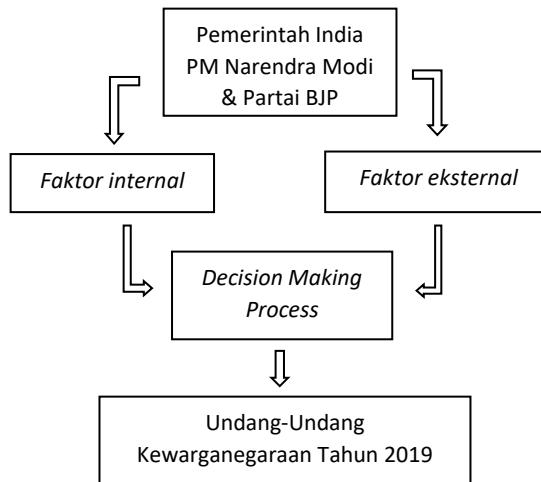
Kerangka Teori

A. Teori *Decision Making* by Snyder

Salah satu metode untuk mengetahui dan memahami tindakan dari suatu negara dalam hubungan internasional adalah melalui proses pengambilan keputusan di bidang luar negeri. Snyder berpendapat bahwa perilaku negara sangat dipengaruhi oleh subjektivitas para pembuat keputusan. Dia menekankan bahwa objektivitas tidak terlalu penting, karena cara individu menafsirkan situasi yang ada berpengaruh terhadap hasil keputusan yang diambil (Kuperman, 2006).

Fokus penelitian dalam konsep ini adalah pada perilaku elit pengusaha negara dalam hubungan internasional, analisis kebijakan negara dalam HI berupaya menyoroti elemen pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, para pembuat keputusan dipandang sebagai aktor yang mengendalikan tindakan politik. Oleh karena itu, bidang studi teori pengambilan keputusan berfokus pada "mengapa" dan "bagaimana" tindakan politik dilakukan serta alasan di baliknya. Para aktor seperti Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin berargumen bahwa proses pengambilan keputusan adalah cara bagi suatu negara untuk memahami posisi dalam hubungan internasional. Proses pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi akan menjadi alasan bagi kebijakan luar negeri negara tersebut (Richard C. Snyder H.W. Bruck, 1962).

Gambar 1. Skema Konseptual Penelitian



(Sumber: Olah Data Peneliti).

Mind map diatas adalah garis besar dalam penelitian ini. Perumusan kebijakan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 dipengaruhi karena terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni sebagai berikut:

- 1) Isu politik domestik, mencakup kondisi politik di dalam negeri, di mana terdapat berbagai partai atau kelompok yang berperan dalam pemerintahan dengan tingkat pengaruh yang bervariasi. Dalam sistem politik India keberadaan banyak partai menonjolkan peran partai politik dalam pengambilan keputusan terutama dari kelompok nasionalis Hindu seperti RSS dan partai BJP.
- 2) Opini publik, merujuk pada kumpulan pendapat dari masyarakat yang luas. Opini publik menjadi salah satu faktor yang paling penting dipertimbangkan oleh *decision maker*. Dalam sistem demokrasi di mana kebebasan berekspresi lebih dihargai peran opini publik sangat signifikan dalam proses ini.

- 3) Sikap publik juga berperan menjadi salah satu faktor yang muncul dan menunjukkan sejauh mana pengaturan yang telah dibuat diterima secara luas. Sikap publik dan opini publik saling terkait karena melalui berita atau kampanye yang dirancang, keduanya dapat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Pada konteks ini, kelompok atau individu yang menolak kebijakan pemerintah India seringkali mengekspresikan ketidakpuasan mereka salah satunya dengan melakukan unjuk rasa.
- 4) Posisi geografis suatu negara dapat memengaruhi kekuatannya. India yang berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh serta mempunyai sumber daya alam yang memadai serta perkembangan ekonomi yang pesat menjadi tujuan menarik bagi imigran dari ketiga negara Asia Selatan tersebut.
- 5) Kekuatan nasional India sebagai negara besar mendominasi kawasan Asia Selatan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, teknologi, dan militer. Sejak pertengahan 1980-an pertumbuhan jumlah penduduk meningkat dan menjadikan ekonomi di India menduduki peringkat keempat terbesar dan tercepat di dunia berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP). Secara geografis, India yang berbatasan dengan Samudera Hindia memainkan peran penting karena 97% perdagangan internasionalnya dilakukan melalui jalur laut. Sistem demokrasi liberal dengan tingkat terbesar di dunia menjadikan India memiliki kekuatan nasional yang signifikan didukung oleh kekuatan militer yang kuat dan kemampuan dalam senjata nuklir.

Menurut Xing, kelompok-kelompok ideologis berupaya mencapai tujuan mereka serta bersaing satu sama lain dan juga guna memenangkan posisi jabatan sehingga mereka cenderung menonjolkan isu atau permasalahan

yang mungkin tidak relevan dengan keadaan sebenarnya demi meraih dukungan suara sebanyak mungkin (Xing, 2015). Dalam konteks ini, keberadaan partai besar yang mendominasi pemerintahan India mencerminkan kekuatan yang bertujuan untuk mengamankan kekuasaan dalam mengelola warga negaranya.

Di sisi lain, faktor eksternal terkait kondisi di luar wilayah India, terutama dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, berkontribusi pada meningkatnya jumlah warga negara yang ingin meninggalkan negara mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh krisis ekonomi dan konflik bersenjata yang membuat para imigran menganggap negara asal mereka tidak mampu melindungi nyawa. Tujuan utama migrasi salah satunya adalah menuju India dengan penuh harap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Dalam pengambilan keputusan, para pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mencapai hasil yang terbaik. L. Andi Afinotan mengidentifikasi model dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yakni dengan *Rational Actor Model*. Dalam model ini, pengambil keputusan menetapkan tujuan, menilai kepentingan yang relevan, dan mengevaluasi biaya serta manfaat dari berbagai tindakan. Beberapa pengambil keputusan mungkin lebih berani mengambil risiko sementara yang lainnya cenderung menghindarinya. *Decision making* yang rasional akan mencoba membuat pertimbangan terkait tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dan memilih opsi yang paling sesuai di antara pilihan-pilihan yang ada.

Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, pemerintah India mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian kewarganegaraan kepada imigran dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan dengan syarat bahwa mereka berasal dari agama tertentu yaitu Hindu, Buddha, Sikh, Jain, dan Parsi, sementara Muslim dikecualikan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah

India sebagai aktor rasional dengan tujuan melindungi minoritas dari beberapa agama di ketiga negara Asia Selatan tersebut. Namun, alasan dibalik pengecualian Islam adalah karena pemerintah India yang berpegang pada Ideologi Hindutva memiliki misi untuk mengukuhkan dominasi Hinduisme di India. Ajaran Islam dianggap tidak sejalan dengan Ideologi Hindutva yang menegaskan bahwa India adalah tanah Hindu. Keberadaan umat Muslim yang merupakan agama mayoritas kedua dipandang sebagai ancaman terhadap masa depan nasionalis Hindu di India.

Dalam konteks Model Aktor Rasional, pemerintah India dilihat sebagai entitas yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh Ideologi Hindutva. Dengan mempertimbangkan dominasi Hindu dalam populasi, pemerintah menilai bahwa penguatan identitas Hindu melalui UU Kewarganegaraan India tahun 2019 akan meningkatkan dukungan politik dan menjaga stabilitas kekuasaan. Meskipun keputusan ini menuai kontroversi, pemerintah menganggapnya sebagai langkah rasional demi kepentingan politik jangka panjang.

B. Konsep Politik Identitas

Menurut Lukmantoro, politik identitas berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik spesifik bagi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas, seperti ras, etnis, agama, atau budaya. Dalam konteks masyarakat yang beragam, penerapan politik identitas sering kali terlihat dengan jelas. Namun praktik ini dapat memicu konflik terutama ketika individu merasa mewakili kelompok mayoritas atau minoritas yang berlawanan (Sari & Rochmiatun, 2020).

Dieter Senghaas dalam bukunya "*The Clash of Civilizations*" menjelaskan bahwa India mengalami fenomena pluralitas sosial yang semakin ekstrem akibat mobilisasi dan politisasi. Fenomena ini muncul

sebagai respons terhadap tantangan modernisasi yang belum sepenuhnya teratasi oleh agama Hindu. Meski India mengklaim sebagai negara sekuler, sistem kasta tetap berperan penting dan berkontribusi terhadap konflik sosial. Partai BJP memanfaatkan identitas Hindu untuk meraih suara dari masyarakat mayoritas dan mendominasi kekuasaan dalam pemerintahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan pengumpulan data yang komprehensif. Tipe penelitian ini menggunakan metode Analisis SWOT, yang berfungsi untuk mengevaluasi posisi organisasi, pemerintah, proyek, atau ide dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilannya. Singkatan SWOT mencakup empat elemen yang dianalisis: Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan data sekunder melalui studi pustaka, dengan sumber yang beragam seperti buku, jurnal, laporan, majalah, dan sumber kredibel lainnya dari penelitian sebelumnya di internet.

Hasil dan Pembahasan

Komunitas Muslim di India yang merupakan kelompok agama terbesar kedua memiliki hubungan yang kompleks dengan mayoritas Hindu sepanjang sejarah. Meskipun kedua kelompok ini umumnya hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad, hubungan mereka sering kali tercemar oleh kerusuhan dan kekerasan. UU Kewarganegaraan tahun 2019 yang disahkan oleh pemerintah India era Narendra Modi menimbulkan perpecahan sehingga berdampak pada meningkatnya aksi diskriminasi dan islamofobia yang terjadi.

A. Dampak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 pada diskriminasi terhadap Muslim.

Terjadi demonstrasi di berbagai tempat sebagai reaksi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 yang diterapkan oleh pemerintah India. UU tersebut memberikan jalur cepat bagi imigran dari beberapa negara tetangga untuk memperoleh kewarganegaraan tetapi tidak mencakup Muslim. Akibat dari pengecualian ini, diskriminasi terhadap komunitas Muslim meningkat di berbagai daerah di India. Berikut ini beberapa wilayah yang terkena dampak diskriminasi:

Gambar 1. Tingkat Diskriminasi terhadap Muslim yang terjadi di berbagai wilayah di India



Sumber: Pewresearch.org

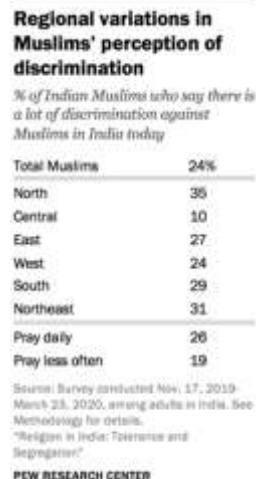
Di India, diskriminasi di kalangan umat Muslim sekitar 24% yang merasa komunitas mereka menghadapi diskriminasi berat. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi diskriminasi meluas dikalangan Muslim tidak umum jika dibandingkan dengan kelompok lain. Menariknya, persentase ini serupa dengan jumlah Hindu yang merasa mereka juga menghadapi

diskriminasi agama secara luas, menunjukkan adanya kesamaan dalam pandangan tentang diskriminasi berdasarkan agama antara kedua kelompok tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengalaman diskriminasi pribadi di kalangan Muslim sangat bervariasi berdasarkan lokasi. Di wilayah Utara India misalnya, 40% dari Muslim melaporkan mengalami diskriminasi agama dalam 12 bulan terakhir. Ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di India, yang menunjukkan bahwa masalah diskriminasi bisa sangat intens di beberapa daerah. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial, politik, dan sejarah lokal yang dapat memengaruhi pengalaman individu.

Diluar angka-angka ini, ada konsensus luas di antara umat Muslim dan Hindu bahwa kekerasan komunal adalah masalah besar di India. Sekitar 65% dari kedua kelompok merasa bahwa kekerasan antar-komunitas merupakan masalah nasional yang sangat serius. Ini menunjukkan bahwa meskipun persepsi diskriminasi bisa bervariasi, ada kesadaran bersama tentang dampak negatif dari kekerasan yang melibatkan berbagai komunitas agama (Pew Research Center, 2021).

Gambar 2. Diskriminasi Berdasarkan Tingkat Religius Muslim



Sumber: Pewresearch.org

Terdapat variasi besar dalam persepsi terhadap diskriminasi agama di berbagai wilayah di India. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perbedaan ini (Pew Reserch Center, 2021):

1. Persepsi Diskriminasi di Wilayah Tengah, Utara, dan Timur Laut:

- Di wilayah Tengah India, hanya satu dari sepuluh orang Muslim yang merasa ada diskriminasi luas terhadap Muslim di India.
- Di wilayah Utara, sekitar sepertiga Muslim (35%) merasa ada diskriminasi yang lebih meluas.
- Di wilayah Timur Laut, sekitar sepertiga Muslim (31%) juga merasa ada diskriminasi yang lebih meluas.

2. Persepsi Diskriminasi Berdasarkan Tingkat Pengamatan Agama:

- Di seluruh negara, sekitar seperempat Muslim yang beribadah setiap hari merasa ada banyak diskriminasi terhadap Muslim (26%).

- Di wilayah Utara, perbedaan ini sangat terlihat, di mana 39% Muslim yang beribadah setiap hari merasa banyak diskriminasi terhadap Muslim di India, yang kira-kira dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang di wilayah yang sama tetapi beribadah di tempat ibadah lebih jarang (20%).

Persepsi diskriminasi agama di India sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan tingkat pengamatan agama. Wilayah Utara dan Timur Laut memiliki tingkat persepsi diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Tengah. Selain itu, tingkat pengamatan agama juga mempengaruhi persepsi diskriminasi dimana Muslim yang lebih religius cenderung merasa ada diskriminasi yang lebih meluas.

B. Tingkat Kenaikan Kasus Islamofobia Di India

Upaya yang dilakukan oleh kelompok politik, organisasi budaya, dan media untuk menciptakan narasi negatif tentang Islam telah memicu meningkatnya islamofobia di masyarakat India. Masalah islamofobia dan kekerasan terhadap komunitas Muslim di India bukanlah hal baru. Setiap tahun, islamofobia semakin meningkat seiring dengan dominasi nasionalisme Hindu, yang dikenal sebagai Hindutva, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Islamofobia di India terutama di bawah pemerintahan Narendra Modi telah menjadi isu yang menonjol dan kompleks. Sejak Modi dan partai BJP berkuasa pada tahun 2014 kemudian kembali terpilih pada tahun 2019, pemerintahannya telah mengadopsi Ideologi Hindutva dalam kebijakan dan tindakan yang sering kali menekan kaum Muslim yang mengakibatkan meningkatnya kasus islamofobia dan kekerasan. Berikut kasus kekerasan yang terjadi:

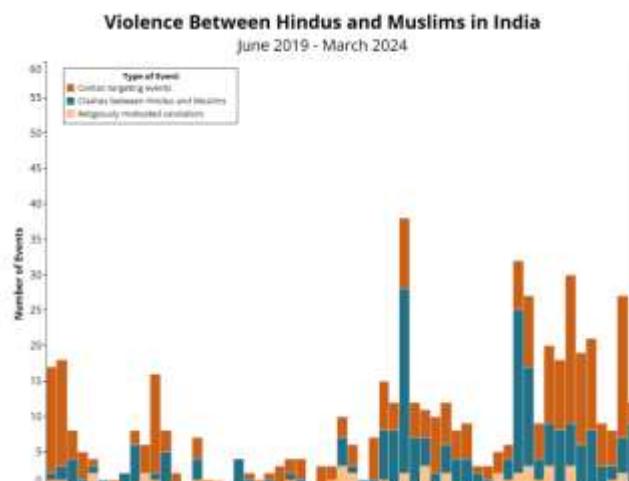
. Tabel 1. Kekerasan yang terjadi di India pada masa pemerintahan Narendra Modi

No.	Tahun	Kejadian
1.	2014	Narendra Modi dari partai BJP terpilih menjadi Perdana Menteri India yang memiliki identitas Hindu dan Ideologi Hindutva menjadikan ketakutan bagi masyarakat muslim di India.
2.	2015	Pada akhir 2014 sampai awal 2015, terdapat beberapa isu kekerasan komunal yang terjadi di Ambheta, Gujarat India.
3.	2016	Terjadi bentrokan pada saat maulid Nabi di Dhulagarh, mengakibatkan beberapa toko dijarah dan dibakar.
4.	2017	Adanya larangan untuk menyembelih dan memakan daging Sapi.
5.	2018	Terjadi bentrokan antar umat Hindu dan Muslim saat festival Dewa Rama.
6.	2019	Pengesahan UU kewarganegaraan tahun 2019 untuk para imigran yang datang ke India. Namun hanya imigran yang berasal dari agama Hindu, Buddha, Sikh, Jain, Parsi dan Kristen yang ada didalam daftar UU tersebut, sedangkan Muslim dikecualikan.
7.	2020	- Bentrokan antara masyarakat Hindu dan Muslim di kota New Delhi dalam aksi protes pengesahan UU Kewarganegaraan tahun 2019 - Muncul istilah Covid Jihad dan Love Jihad
8.	2021	Adanya aksi balas dendam dari Umat Hindu melakukan vandalisme ke masjid di Tripura setelah Puja Pandal di Bangladesh diserang.
	2022	- Adanya larangan penggunaan Hijab di negara bagian Karnataka. - Rumah umat muslim banyak dihancurkan - <i>Hate speech</i> yang dilakukan oleh Nupur Sharma yakni seorang Juru bicara dari

9.		partai BJP yang menghina bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil dikarenakan menikahi Aisyah yang berusia belia. Pernyataan ini menyebabkan demonstrasi besar dan kerusuhan antara umat Hindu yang pro dan umat Muslim yang tidak terima dengan pernyataan tersebut. Masalah ini memicu kemarahan hingga boikot produk India oleh pihak internasional.
10.	2023	Aksi pembakaran masjid, membunuh ulama dan penggusuran paksa rumah-rumah masyarakat muslim yang dilakukan oleh kelompok Hindu di wilayah Nuh negara bagian Haryana memicu kekerasan antara Hindu dan Muslim
11.	2024	Penggusuran masjid Babri di Ayodhya dan digantikan kuil Ram Hindu diresmikan Januari 2024 oleh Mahkamah Agung India

Sumber: Dikelola oleh penulis dari berbagai sumber

Gambar 3. Tingkat Kekerasan setelah UU Kewarganegaraan tahun 2019 disahkan



Sumber: Acleddata.com

Kasus kerusuhan antara komunitas Hindu dan Muslim di India antara tahun 2014 hingga 2024 menggambarkan dinamika yang kompleks terkait dengan ketegangan sosial, politik, dan identitas. Setelah pemilihan umum 2014 yang mengantarkan Partai BJP ke kekuasaan, suasana politik di India mengalami perubahan drastis. Kebangkitan nasionalisme Hindu yang didorong oleh BJP telah memperburuk ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim yang merupakan dua kelompok mayoritas di negara ini. Meskipun India mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler dalam konstitusi, banyak yang merasa bahwa pemerintah lebih mendukung kepentingan Hindu menyebabkan umat Muslim merasa terpinggirkan.

Berbagai bentuk kekerasan meningkat selama pemerintahan Narendra Modi, terutama pada masa periode keduanya. Pada tahun 2019, Modi mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap umat Muslim. Kerusuhan di Delhi pada tahun 2020 menjadi momen penting yang dipicu oleh protes terhadap undang-undang tersebut, mengakibatkan bentrokan antara kelompok pro dan kontra yang meluas, menyebabkan puluhan kematian dan kerusakan besar pada infrastruktur (ACLED, 2024).

C. Analisis SWOT

Pada kebijakan UU Kewarganegaraan tahun 2019 berdasarkan faktor internal dan eksternalnya maka diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

a. Perhitungan Matriks *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS)

Setelah melakukan identifikasi faktor internal, Peneliti melakukan perhitungan bobot yang ditentukan dengan level kepentingan mulai dari skala 0 (tidak penting) hingga skala 1 (sangat penting) sehingga apabila bobot ditotal dari total *strengths* dan *weakness* akan berjumlah 1. Selanjutnya, dalam perhitungan matrik IFAS menghitung nilai rating untuk setiap faktor

yang tidak melebihi skala 1,00 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai skala 4,00 (sangat baik). Dibawah ini tabel perhitungan *Internal Factors Analysis Summary* dalam terbentuknya kebijakan UU Kewarganegaraan tahun 2019:

Tabel 2. Analisis Faktor Internal (*Internal Factor Analysis*)

	Indikator	Bobot	Rating (faktor prioritas)	SKOR (Bobot x Rating)
Kekuatan	Kemenangan partai BJP selama 2 periode	0,34	3	1,02
	Dukungan kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang sangat mendukung pemerintah berkuasa	0,33	1	0,33
	Dukungan masyarakat Hindu terhadap realisasi UU Kewarganegaraan tahun 2019	0,33	2	0,33
	Jumlah	1,00		1,68

	Indikator	Bobot	Rating (faktor prioritas)	SKOR (Bobot x Rating)
Kelemahan	Tertundanya pengesahan UU Kewarganegaraan tahun 2019	1,00	1	1,00
	Jumlah	1,00		1,00

$$\text{Skor Faktor Internal} = \text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 1,68 - 1,00 = 0,68$$

b. Perhitungan Matriks *Eksternal Factors Analysis Summary (EFAS)*

Setelah melakukan identifikasi faktor eksternal, Peneliti melakukan perhitungan bobot yang ditentukan dengan level kepentingan mulai dari skala 0 (tidak penting) hingga skala 1 (sangat penting) sehingga apabila bobot ditotal dari total *opportunity* dan *threats* akan berjumlah 1. Selanjutnya, dalam perhitungan matrik EFAS menghitung nilai rating untuk setiap faktor yang tidak melebihi skala 1,00 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai skala 4,00 (sangat baik). Dibawah ini tabel perhitungan *Eksternal Factors Analysis Summary*:

Tabel 3. Analisis Faktor Eksternal (*Eksternal Factor Analysis*)

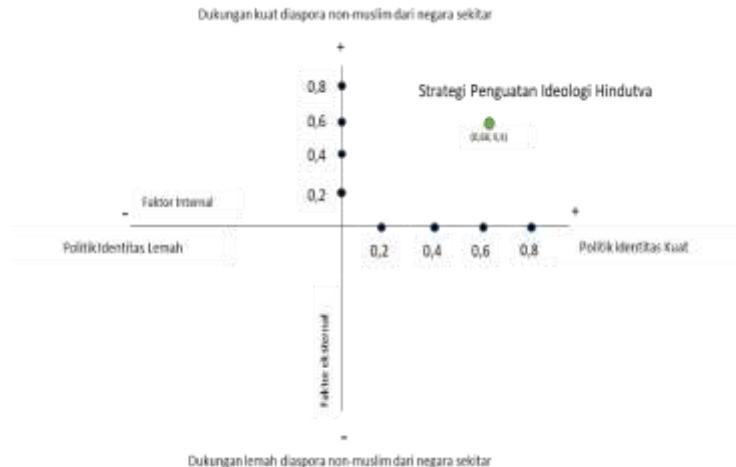
	Indikator	Bobot	Rating (faktor prioritas)	SKOR (Bobot x Rating)
Peluang	Kesempatan bagi minoritas Hindu yang dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan untuk mencari suaka di India	0,6	2	1,2
	Percepatan jalur kewarganegaraan bagi sebagian orang yang beragama Hindu, Buddha, Sikh, Jain dan Parsi	0,4	1	0,4
	Jumlah	1,0		1,6

Ancaman	Indikator	Bobot	Rating (faktor prioritas)	SKOR (Bobot x Rating)
	Kecaman dari komunitas internasional untuk mencabut UU Kewarganegaraan tahun 2019	1,00	1	1,00
	Jumlah	1,00		1,00

$$\text{Skor Faktor Eksternal} = \text{Peluang} - \text{Ancaman} = 1,6 - 1 = 0,6$$

Berdasarkan perhitungan matriks IFAS dan EFAS diatas, maka diagram SWOT untuk strategi Ideologi Hindutva dalam partai BJP dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Matrix SWOT Strategi Ideologi Hindutva



Sumber: Olah Data

Cara mencari koordinatnya adalah menggunakan nilai skor IFAS dan EFAS:

= Total skor *strengths* - total skor *weakness*; Total skor *opportunity* - total skor *threats*

$$= 1,68 - 1; 1,6 - 1$$

$$= 0,68; 0,6$$

Hasil analisis *Internal Factor Analysis Summary (IFAS)* dan *External Factor Analysis Summary (EFAS)* menunjukkan hasil yang positif, yang menandakan bahwa baik faktor internal maupun eksternal mendukung kebijakan politik identitas yang diterapkan oleh *Bharatiya Janata Party (BJP)*. Skor positif pada IFAS mengindikasikan adanya dukungan signifikan dari dalam masyarakat India terhadap kebijakan tersebut. Khususnya, masyarakat India yang beragama Hindu atau yang sejalan dengan ideologi BJP menganggap politik identitas ini sebagai sesuatu yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini menunjukkan bahwa BJP telah berhasil memperoleh dukungan luas dari basis pemilihnya, yang melihat kebijakan politik identitas sebagai legitimasi dan justifikasi bagi strategi politik partai.

Selain dukungan internal, hasil positif pada EFAS menunjukkan adanya dukungan penting dari diaspora non-muslim, yaitu komunitas India yang tinggal di negara-negara sekitar India. Dukungan ini mencakup bantuan politik dan finansial yang memperkuat posisi BJP secara internasional. Diaspora non-muslim merasa diuntungkan oleh kebijakan BJP, yang memperkuat ikatan politik dan dukungan mereka terhadap partai tersebut. Dengan dukungan ini, BJP dapat memanfaatkan hubungan internasionalnya untuk mendapatkan keuntungan politik yang lebih besar.

Selama dua periode kepemimpinan, BJP telah mengimplementasikan strategi yang menguatkan Ideologi Hindutva, yaitu ideologi yang menekankan dominasi dan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan politik dan sosial India. Strategi ini berfokus pada penguatan identitas Hindu sebagai landasan utama kebijakan partai, yang berkontribusi pada konsolidasi dukungan di kalangan

pemilih Hindu. Namun, penguatan Ideologi Hindutva juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk peningkatan islamofobia di India. Kebijakan politik identitas yang mengutamakan identitas Hindu sering kali menyebabkan marginalisasi komunitas Muslim, meningkatkan kebencian, prasangka, dan diskriminasi terhadap umat Muslim. Akibatnya, kebijakan BJP tidak hanya mempengaruhi dukungan politik yang diterima tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan ketegangan antaragama di India secara keseluruhan.

Kesimpulan

Untuk menciptakan sebuah negara yang teratur dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, penting bagi negara tersebut untuk menerapkan kebijakan yang diatur pada Undang-Undang dan warga negara harus menaatiinya. Di India, pengaruh budaya dan agama sangat kuat dalam pembentukan kebijakan pemerintah terutama karena tradisi Hindu yang menjunjung sistem kasta dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kehidupan sosial masyarakat India sangat berkaitan dengan agama termasuk bagi imigran khususnya imigran Muslim.

Hindutva, sebagai ideologi yang berkembang di India bertujuan untuk menjadikan negara ini mayoritas Hindu. Penerapan ideologi ini selama masa kepemimpinan Narendra Modi terkait erat dengan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 2019. Undang-undang ini memberikan pengecualian bagi imigran dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang beragama Islam, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan India. Kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap masyarakat Muslim dan imigran Muslim, serta kontroversial karena bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi India yang menjamin perlakuan setara tanpa membedakan agama, ras, atau golongan.

Sejak penerapan kebijakan tersebut, kerusuhan terjadi di berbagai daerah di India mengakibatkan banyak korban dalam aksi protes menentang Undang-Undang ini. Selain itu diskriminasi terhadap Muslim semakin meningkat ditandai dengan pelarangan dalam menjalankan praktik keagamaan serta penggusuran tempat ibadah, rumah, dan sekolah Islam oleh kelompok mayoritas yang anti-Islam. Tingkat islamofobia di India juga mengalami lonjakan signifikan setelah pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 ini. Protes dan kritik dari komunitas internasional pun bermunculan menyerukan agar kekerasan yang terjadi di India dihentikan.

Referensi

- ACLED. (2024). *India Votes 2024: A resurgent Hindu nationalism sets the stage for the upcoming elections, driving communal violence.* <https://acleddata.com/2024/04/28/india-votes-2024-a-resurgent-hindu-nationalism-sets-the-stage-for-the-upcoming-elections-driving-communal-violence/>, diakses pada 22/09/2024.
- Arvind Sharma. (2020). *Asian Philosophies and Religions* I. <https://tinyurl.com/vaeoxno>
- Krishnan, M. (2022, February 18). *India: Is “Hindutva” a civilizational principle?* DW-02/18/2022.
- Kuperman, R. D. , & O.-T. B. (2006). Making Research on Foreign Policy Decision Making More Dynamic. *International Studies Review*, 8(3), 537–554. <http://www.jstor.org/stable/3880278>
- Lavinia, N. (2020, February 27). *Memahami Konteks Konflik Muslim dan Hindu di India Biar Nggak Terprovokasi.* MOJOK 27/02/2020. <https://mojok.co/pojokan/memahami-konteks-konflik-muslim-dan-hindu-di-india-biar-nggak-terprovokasi/>, diakses pada 13/07/2024.
- MINISTRY OF LAW AND JUSTICE. (n.d.). Retrieved August 4, 2024, from https://indiancitizenshiponline.nic.in/Documents/UserGuide/E-gazette_2019_20122019.pdf

- Pew Research Center. (2021). *Religion in India: Tolerance and Segregation*.
<https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>, diakses pada 18/08/2024.
- Pew Reserch Center. (2021). *Religious freedom, discrimination and communal relations*.
<https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religious-freedom-discrimination-and-communal-relations/>, diakses pada 18/08/2024.
- Richard C. Snyder H.W. Bruck, and B. S. (1962). *SnyderBruckSapin*. The Free Press.
- Sari, I., & Rochmiatun, E. (2020). Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 38–48.
<https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5203>
- THE CITIZENSHIP ACT, 1955*. (n.d.).
- Thohir, A. , & K. A. (2006). *Islam di Asia Selatan - Ajid Thohir, Ading Kusdiana*.
- Xing, Y. (2015). Analysis of Political Decision Making and Its Influencing Factors. *Cross Cultural Communication*, 11(3), 42–45.